

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-21 adalah abad kepemimpinan wanita, demikian ramalan Naisbit dan Aburdene (1990, h.261). Pernyataan Naisbit dan Aburdene tersebut nampaknya memiliki dampak yang begitu besar termasuk di Indonesia. Dikatakan bahwa abad 21 adalah milik kaum wanita. Mereka akan memasuki seluruh jaringan kerja, mulai dari usahawan, politisi, sampai militer. Orang kemudian mulai mengamati dan kemudian menemukan fakta bahwa wanita mulai bermunculan dimana-mana sebagai pemimpin. Selanjutnya dikatakan bahwa perkembangan kualitas wanita mengalami peningkatan yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan besar kini telah memasuki tahap dimana kaum wanita mulai diberi kepercayaan untuk menduduki posisi penting.

Jika kita amati, akhir-akhir ini masalah yang menyangkut kaum wanita ramai dibicarakan diberbagai forum, misalnya forum wanita dalam pembangunan, wanita karier dan problematikanya, kepemimpinan wanita, wanita dan hak asasi manusia dan masih banyak lagi tema-tema lain yang berkisar tentang wanita. Hemas (1992, h.152) mengemukakan bahwa dengan diangkatnya berbagai masalah kewanitaan keberbagai forum menunjukkan bahwa wanita memiliki kepedulian dan kepekaan tidak saja tentang kehidupan rumah tangga dan perkembangan karier wanita itu sendiri tetapi juga

menyangkut keperihatinan mereka tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat.

Seperti telah diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia ada persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria. Antara wanita dan pria tidak ada perbedaan dalam memperoleh dan melaksanakan pekerjaan apapun yang halal sesuai dengan kemampuannya. Prestasi baik dalam pekerjaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan seseorang (Tilaar, 1991, h.2).

Suatu anggapan dasar sebagai awal dari pembahasan disini berpijak pada pendapat bahwa kaum wanita juga memiliki peranan yang penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peranan ini tidak saja untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Berbicara mengenai wanita sebagai pemimpin terutama pemimpin dalam sebuah organisasi perusahaan atau industri sampai saat ini masih ada pandangan yang tidak menguntungkan kaum wanita yang berpeluang menjadi pemimpin, karena masih dianggap kurang tepat menduduki posisi tersebut (Mantindas, 1991, h.4). Achir (1992) dalam sebuah seminar yang bertemakan "Tenaga kerja wanita menyongsong abad 21" mengemukakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh wanita bekerja adalah adanya mitos yang berpendapat bahwa wanita hanya sesuai untuk jenis pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kodratnya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Suratman (1991, h.72) yang mengemukakan bahwa meskipun sebagai pribadi, wanita dan pria memiliki hak sama untuk berkembang, namun dalam kenyataannya, baik dinegara maju maupun negara berkembang, wanita sering dianggap sebagai warga negara kelas dua yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya. Kemudian ikut mendukung pula pernyataan Murniati (1992, h.76) yang menyatakan bahwa wanita karier masih menghadapi banyak beban, salah satunya adalah wanita karier aktif yang menantang justru dipandang dan dianggap menjadi ancaman bagi pria yang merasa akan ditindas wanita.

Ketergantungan wanita pekerja yang amat besar pada penerimaan upah, disamping menempatkan kaum wanita pekerja pada problem kebutuhan perlindungan seperti yang diperlukan para pekerja pada umumnya, juga menuntut perlunya perhatian tersendiri terhadap beberapa segi khusus baik yang bersifat kodrati maupun berakar pada kondisi yang melatarbelakangi kehidupan wanita pekerja itu pada umumnya (Anoraga, 1992, h.119).

Menyadari akan hal itu, sistem hukum dan politik Indonesia telah menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kesempatan yang sama bagi warganya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan tidak membedakan antara pria dan wanita. hal ini

menunjukkan penghargaan kedudukan dan harkat yang tinggi kaum wanita. Pemerintah juga, mengukuhkan konfensi PBB tahun 1952 tentang hak-hak politik wanita (*Convention Of The Political Of Woman*) dan konfensi tentang peniadaan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention Of All Form Discrimination Against Woman*).

Konfensi-konfensi Internasional di atas telah memperkuat jaminan hak pada pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Tak dapat disangkal lagi, kehadiran kaum wanita dalam dunia kerja besar manfaatnya dan perlu sebagai rekan kerja kaum pria, tidak hanya dirumah tetapi juga dalam bekerja dan menyalurkan potensi dan bakat-bakat mereka. Kemajuan dan peningkatan kaum wanita sangat pesat didunia kerja. Telah sekian banyak bukti-bukti yang dapat kita lihat bahwa wanitapun dapat berbuat banyak seperti rekan prianya, bahkan ada kalanya mereka lebih dari apa yang telah diperbuat kaum pria (Anoraga, 1992, h.120).

Mitos atau pandangan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa wanita masih dianggap kurang tepat bila menduduki jabatan sebagai pemimpin, hal ini tidak lepas dari faktor budaya dan sejarah dari masyarakat itu sendiri. Di Indonesia sendiri faktor budaya dan sejarah ini masih sangat terasa. hal ini merupakan peninggalan dari jaman feodal, yang menempatkan wanita sebagai warga kelas dua. Masyarakat kita saat inipun masih ada yang mempunyai pandangan seperti tersebut diatas.

Atas dasar hal tersebut diatas maka peneneliti ingin mengetahui, sejauh mana pandangan mahasiswa serta penilaian atau persepsi mereka terhadap sosok pemimpin wanita, karena mahasiswa juga merupakan anggota masyarakat yang sedikit banyak masih memiliki pandangan yang kurang menguntungkan bagi kaum wanita serta sebagai calon intelektual yang dapat memelihara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada Perbedaan Persepsi Terhadap Kepemimpinan Wanita Antara Mahasiswa Pria Dan Mahasiswa Wanita Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empirik perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan wanita antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya, untuk perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi industri maupun untuk keperluan praktis, dalam hal ini yang berhubungan dengan persepsi tentang kepemimpinan wanita.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan secara teoritis pada bidang psikologi, khususnya psikologi industri dan sosial dalam kaitannya dengan kepemimpinan wanita.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya data-data empirik tentang persepsi terhadap kepemimpinan wanita, akan menimbulkan penilaian terhadap kepemimpinan wanita lebih tepat.